

**OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA  
(ANALISIS FIQH SIYASAH)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MASHADI  
99373566**

**PEMBIMBING**

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Saudara Mashadi

Kepada Yth.:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Mashadi  
NIM : 99373566  
Judul : "Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah)"

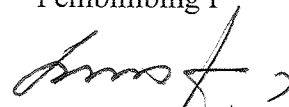
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 02 Jumadil Tsaniyah 1426 H  
09 Juli 2005 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam.  
NIP. 150 046 306

Drs. Slamet Khilmi  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Saudara Mashadi

Kepada Yth.:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Mashadi  
NIM : 99373566  
Judul : "Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Fiqh Siyasah)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 02 Jumadil Tsaniyah 1426 H  
09 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150 252 260

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

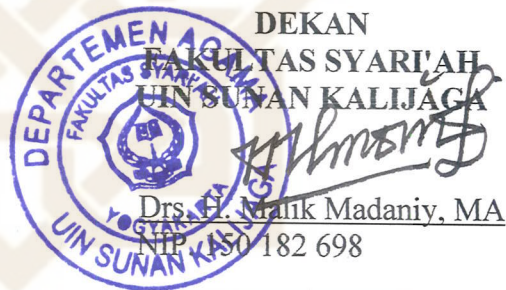
**"Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia  
(Analisis Fiqh Siyasah)"**

**Yang disusun oleh:**

**MASHADI**  
**NIM: 99373566**

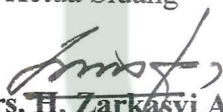
telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 M / 06 Rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Agustus 2005 M  
13 Rajab 1426 H




**Panitia Ujian Munaqasyah**

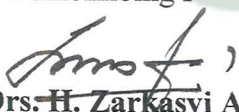
**Ketua Sidang**

  
**Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam.**  
NIP. 150 046 306


**Sekretaris Sidang**

  
**Udiyo Basuki, SH.**  
NIP. 150 291 022

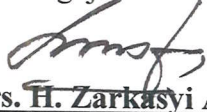
**Pembimbing I**

  
**Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam**  
NIP. 150 046 306

**Pembimbing II**

  
**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP. 150 252 260

**Penguji I**

  
**Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam**  
NIP. 150 046 306

**Penguji II**

  
**Drs. Rizal Qosim, M. Si.**  
NIP. 150 256 649

## MOTTO

﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾

﴿وأولئك هم المفلحون﴾<sup>1</sup>

﴿قل الحق ولو كان مرا﴾

### *Artinya:*

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

“Katakanlah yang *haq* (benar) walau pahit sekalipun”

---

<sup>1</sup> Ali Imran (3):104

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya

persembahkan kepada :

- ↳ Kedua Orang Tua ku yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan
- ↳ Kakakku (Nurkhasanah) yang tidak pernah bosan memberikan motivasi dan Adik-adikku (Abbas dan Ipah)
- ↳ Semua teman-teman senasib seperjuangan yang telah banyak mewarnai hari-hariku
- ↳ Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## ABSTRAK

Perkembangan politik Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan mengalami pasang surut yang tidak pernah mencapai kesudahan. Hal ini bisa dipahami karena pada masa itu merupakan proses pencarian format sistem politik yang ideal. Tolak tarik antara sistem politik yang demokratis dan otoriter selalu muncul secara bergantian melalui pergulatan politik yang kadangkala keras.

Kekuasaan yang besar di tangan penguasa terkadang menjadikannya bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan kekuatan oposisi yang bertugas untuk mengawasi kekuasaan dan juga sebagai kritik kepada kekuasaan agar tidak semena-mena. Adanya partai oposisi merupakan jalan formal untuk mewujudkan peran tersebut. Namun demikian oposisi tidak selalu diidentikkan dengan kegiatan partai politik. Oposisi dan kritik kepada kekuasaan adalah sebuah fungsi dan aktifitas politik yang dapat dijalankan oleh semua pihak, baik individu, masyarakat maupun sebuah lembaga.

Karena pentingnya fungsi oposisi tersebut maka pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap posisi oposisi dan sistem pemerintahan Indonesia ?

Dengan pembatasan masalah tersebut diharapkan akan dapat memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi Hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut perspektif Fiqh Siyasah. Selanjutnya dapat ditemukan dalil-dalil yang digunakan dalam pengabsahan kegiatan oposisi dalam pemerintahan Indonesia. Terakhir dapat membuka wawasan pemikiran umat Islam mengenai oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan sosio-historis, yaitu suatu proses terus menerus, kritis, terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang saling berhubungan dengan merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari peristiwa di masa lalu.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, oposisi dalam pemerintahan Indonesia pada masa Orde lama tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya dukungan dari pemerintah, sedangkan pada masa Orde baru nasib oposisi tidak berbeda dengan masa sebelumnya. Proses *kooptasi* dan ancaman *represif* dijalankan terhadap kekuatan-kekuatan sosial maupun politik di luar birokrasi. Sehingga oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) tidak berjalan efektif. *Kedua*, sikap oposisi ini menurut perspektif Fiqh Siyasah harus bersifat loyal dan konstruktif. Oposisi yang dibolehkan harus dilakukan secara proporsional dan konstitusional (*al-Mauizah al-Hasanah*) agar transformasi politik tetap berada dalam kondisi yang stabil dan tidak membawa kepada kerusakan sendi-sendi kemasyarakatan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

#### Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

### 1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

### Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Fiqh Siyasa)" yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Malik Madani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Mahrus Munajat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Drs. Slamet Khilmi, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengasuh dan membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, khususnya “kost BHINEKA” (Mutsa, Asqolani, Fatich, Watstari, Munzīr, Taufik Simanjutak, Tahul, Wahid Nduth, Boyor, Si Bos Solihin Clin, Siti Robi'ah Iyoph), serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penulis hanya dapat berdo'a semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis mohon pertolongan dan berserah diri.

Yogyakarta, 16 Juni 2005  
Penulis



Mashadi  
NIM. 99373566

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG OPOSISI DAN SISTEM PEMERINTAHAN</b>	
A. Pengertian Oposisi .....	16
1. Oposisi Parlementer .....	19
2. Oposisi Ekstra Parlementer .....	21
B. Pola Umum Oposisi .....	23
C. Peranan Lembaga Oposisi.....	26
D. Sistem Pemerintahan .....	30
1. Sistem Presidensial .....	31
2. Sistem Parlementer .....	34
3. Sistem Referendum .....	36

<b>BAB III : OPOSISI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA</b>	
A. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	38
1. Demokrasi Parlementer .....	41
2. Demokrasi Terpimpin .....	43
3. Demokrasi Pancasila .....	44
B. Oposisi di Indonesia .....	45
1. Sejarah Oposisi .....	45
2. Hubungan Lembaga-Lembaga Politik .....	49
3. Proses Demokratisasi di Indonesia .....	51
<b>BAB IV : OPOSISI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b>	
A. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin .....	55
B. Ketaatan Terhadap Konstitusi .....	58
C. Budaya Oposisi Dalam Islam.....	61
D. Batas-Batas Melakukan Oposisi .....	69
E. Tujuan Oposisi dalam Islam .....	72
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan melesatnya isu demokrasi di berbagai negara, wacana demokrasi semakin mencair dari sekedar teori pemerintahan rakyat ke teori yang memberikan ruang yang lebih luas. Misalnya nilai-nilai kebebasan individu, persamaan serta koperasi sosial tidak saja selaras dan cocok, melainkan perwujudannya membutuhkan satu sama lain.

Kebebasan sebagai salah satu prinsip demokrasi harus disertai dengan nilai-nilai etis dan normatif, sehingga demokrasi tidak berbenturan dengan norma yang berkembang di masyarakat. Demokrasi dalam wilayah ini harus mencerminkan semangat dan kehendak rakyat tanpa harus mengenyampingkan persoalan profetik.<sup>1</sup>

Sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan mulai menjalankan pemerintahannya, setidaknya pernah mempraktekkan tiga jenis demokrasi, yakni demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, yang dalam pelaksanaannya telah terjadi tolak tarik antara politik yang demokratis dan politik yang otoriter.<sup>2</sup> Dengan kata lain politik demokratis dan otoriter selalu muncul secara bergantian

---

<sup>1</sup> Eko Taranggono, "Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu" *Jurnal al-Afkar* Edisi VI, Tahun ke-5 : Desember 2002, hlm. 54.

<sup>2</sup> Amien Rais, *Suksesi & Keajaiban Kekuasaan*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 16.



melalui pergulatan politik yang kadangkala keras.<sup>3</sup> Biasanya kecenderungan sistem politik yang demokratis terjadi pada tahun-tahun awal sebuah rezim, sebagai bagian dari strategi awal untuk membangun suatu format politik baru yang kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan yang otoriter.

Pengalaman sejarah bangsa ini membuktikan betapa rezim Orde Baru pada awal pemerintahannya relatif mengalami keberhasilan di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi yang mengalami kemajuan dan stabilitas politik yang relatif mantap,<sup>4</sup> persatuan dan kesatuan bangsa telah menjadi realitas bangsa yang sangat membanggakan, citra internasional Indonesia juga meningkat lebih baik. Namun karena rezim ini yang dalam perkembangannya, ternyata telah banyak melakukan penyimpangan kekuasaan yang serupa dengan rezim sebelumnya (Orde Lama), bahkan lebih otoriter dan represif, juga di dalamnya terdapat kebobrokan-kebobrokan dan beberapa masalah yang sudah kronis dan cukup kompleks yang melanda semua aspek kehidupan, baik masalah politik maupun masalah ekonomi, akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menentang di luar pemerintahan.

Adanya tanda-tanda krisis politik yang dialami oleh Orde Baru sebenarnya sudah lama menggejala, namun tersembunyi di bawah permukaan. Tampak dari kritik-kritik yang menggema dalam masyarakat seperti yang

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Baru Menuju Supremasi Hukum : Sebuah Antaran Akademis" dalam M. AS. Hikam dkk, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xxv.

<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan keberhasilan rezim Orde Baru dalam menyingkirkan segala anasir kekuatan pembangkang di luar birokrasi, proses *kooptasi* dan ancaman *represif* dijalankan terhadap kekuatan-kekuatan sosial maupun politik. Akibatnya tidak ada kekuatan kritis maupun oposisi yang mampu tampil secara efektif sebagai kontrol kekuasaan. Saluran partisipasi hanya dibiarkan terbuka sejauh partisipasi itu dilakukan dalam kerangka rambu-rambu penegakan *status Quo*. Tidak mengherankan jika rezim ini mampu bertahan cukup lama.

disuarakan oleh kalangan oposisi, misalnya tentang kepemimpinan nasional, pembaharuan tatanan sistem dan budaya politik, pembenahan sistem kepartaian dan pemilu, serta demokratisasi lembaga perwakilan. Namun sayangnya berbagai kritik yang menggelinding tentang cacat-cacat Orde Baru tersebut tidak mendapatkan respon yang sewajarnya, Malahan dihadapi oleh penguasa dengan cara yang sangat otoriter dan represif.<sup>5</sup> Juga untuk mempertahankan dan memapankan *status quo* telah dilakukan berbagai bentuk rekayasa politik dengan *mengkooptasi* kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Sehingga jika dilihat secara kalkulasi politik maka betapa sulitnya meruntuhkan rezim ini dengan kekuatan *oposan* manapun. Bahkan melalui tekanan politik dalam bentuk gerakan massa model apapun kecuali melalui revolusi.

Namun demikian, sejarah berbicara lain Soeharto harus menyerah dan melepaskan kedudukannya secara dramatis. Hal yang menarik adalah bahwa dia diruntuhkan bukan melalui jalan revolusi dalam arti pendongkelan politik secara fisik tetapi justru melalui gerakan aksi damai yang dimotori oleh kalangan oposisi. Hal ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan bernegara bahwa penguasa dengan kekuasaan besar ditangannya perlu diawasi, sebab kecenderungan penguasa untuk memperluas kekuasaannya dan menyelewengkan penggunaan kekuasaannya adalah jauh lebih besar dari pada kemampuannya untuk mengawasi dirinya.

---

<sup>5</sup> Ardi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 147.

Setiap penguasa tentu akan berbicara tentang kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai suatu keharusan retorika dan kampanye politik, akan tetapi sebaiknya harus diwaspadai bahwa kepentingan pertama penguasa adalah mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasaannya. Oleh karena itu diperlukan kekuatan oposisi yang bertugas untuk mengawasi kekuasaan dan juga untuk mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijaksanaan sehingga apabila kebijaksanaan itu diterapkan segala hal yang dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan lebih dulu ditekan seminimal mungkin. Begitu juga tentang masalah *accountability* atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah karena pemerintah harus selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijakan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, serta dengan cara bagaimana kebijakan itu diterapkan.<sup>6</sup>

Perlu ditekankan bahwa oposisi dibutuhkan sebagai kritik kepada kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak semena-mena. Adanya partai oposisi merupakan jalan formal untuk mewujudkan peran tersebut. Namun demikian, oposisi dan kritik kepada kekuasaan tidak perlu diidentikkan seluruhnya dengan kegiatan sebuah atau beberapa buah partai. Oposisi dan kritik kepada kekuasaan adalah sebuah fungsi dan aktifitas politik yang dapat dijalankan di dalam maupun di luar partai oposisi. Misalnya pers atau media-media yang lain dapat memainkan peranannya dengan menyumbangkan banyak kontrol kepada kekuasaan. Kelompok-kelompok

---

<sup>6</sup> Ignas Kleden, "Oposisi Dalam Politik Indonesia" dalam Musa Khazim (Ed), *Menuju Indonesia Baru: Menggagas Reformasi Total* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm151-153.

kritis, misalnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi profesional dan terutama sekali para mahasiswa serta kalangan kampus pada umumnya juga dapat melakukan kontrol sosial dan kritik pada penggunaan kekuasaan berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di bidang yang digelutinya.

Pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru yang kemudian beralih kepada era baru (baca: reformasi), maka kebebasan yang dulu dikekang oleh penguasa kini menemukan momentumnya untuk bebas berekspresi baik yang bersifat sosial, keagamaan, budaya, terlebih lagi dalam bidang politik. Setelah bergulirnya gerakan reformasi, bermunculan partai-partai baru, LSM-LSM, baik yang berorientasi di bidang sosial maupun di bidang politik dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, khususnya lembaga-lembaga yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjalankan fungsi oposisi yang selalu mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai fenomena semakin derasnya tuntutan demokratisasi dalam kehidupan bernegara.

## **B. POKOK MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana posisi oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia ?

Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap posisi oposisi dan sistem pemerintahan Indonesia?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh kejelasan tentang posisi oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap oposisi dan sistem pemerintahan di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan oposisi dalam pemerintahan Indonesia menurut perspektif fiqh siyasah.
2. Menemukan dalil-dalil yang digunakan dalam pengabsahan kegiatan oposisi politik dalam pemerintahan di Indonesia.
3. Membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang oposisi dalam pemerintahan Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian fiqh siyasah dalam studi hukum Islam yang akan datang.

### **D. TELAAH PUSTAKA**

Sejauh ini kajian tentang oposisi politik telah banyak dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis, belum ada yang secara khusus membahas tentang kajian lembaga oposisi di Indonesia dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah. Setidaknya buku yang telah ditulis oleh cendekiawan muslim yang berbicara mengenai oposisi dengan menggunakan sudut pandang Islam antara lain:

Fahmi Huwaydi dalam bukunya, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*<sup>7</sup>, mengungkapkan persoalan demokrasi dengan real politik Islam. Bahkan lebih dari itu, menjabarkan hampir seluruh tema-tema besar persoalan politik Islam kontemporer. Oposisi sebagai salah satu alat kontrol dalam sistem demokrasi yang hampir mustahil terdapat di negara-negara Islam juga dikaji secara kritis. Namun demikian buku ini tidak membahas secara komprehensif tentang posisi oposisi dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia dengan perspektif fiqh siyasah.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Dr. Jabir Qumaihah, *Beroposisi menurut Islam*.<sup>8</sup> Dalam buku ini dikupas tentang konsep oposisi secara detail, seperti membahas garis besar tentang hak-hak oposisi dan berbagai permasalahannya, menyangkut jaminan dan kaidah beroposisi, pengertian dan implikasi oposisi dan membahas juga praktek oposisi pada zaman rasulullah saw. dan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Buku karya Eep Saefullah Fatah dengan judul *Membangun Oposisi (Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan)*,<sup>9</sup> membahas pertumbuhan gerakan oposisi dalam konteks Indonesia dengan sudut pandang universal (Islam). Buku ini mengelaborasi agenda-agenda pembangunan oposisi yang permanen dan solid. Pembahasannya diletakkan dalam konteks rekonsolidasi otoritarianisme yang menggejala pasca kejatuhan Soeharto. Tak ada pilihan

---

<sup>7</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghoffar E.M. (Bandung: Mizan, 1996)

<sup>8</sup> Jabir Qumaihah, *Beroposisi Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990)

<sup>9</sup> Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi: Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan* (Bandung: Rosadakarya, 1999)

lain bagi bangsa agar selamat melewati masa transisi menuju demokrasi, kecuali harus mentradisikan oposisi, baik dalam pemerintahan, parlemen maupun gerakan ekstra-parlementer.

Anders Uhlin dalam bukunya yang berjudul *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*<sup>10</sup> membahas tentang gerakan oposisi diluar parlemen. Disebut oposisi berserak, karena gerakan oposisi ini tersebar di pelbagai LSM, mahasiswa, ormas, interest group, pers, dan lain sebagainya.

Digambarkan bahwa kerja dari oposisi ini tidaklah mudah, karena mereka tidak memiliki akses secara langsung dalam pengambilan kebijakan. Berbeda dengan oposisi intra-parlemen yang memiliki andil langsung dalam membentuk kebijakan. Maka, agar oposisi ekstra-parlemen berfungsi efektif, diperlukan massifikasi gerakan sehingga dapat mempengaruhi opini publik.

Skripsi Beny Susanto yang berjudul “Partai Oposisi dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”, secara khusus membahas tentang gagasan-gagasan Ibnu Khaldun yang bersinggungan dengan tema oposisi. Disamping itu juga dijelaskan bahwa teori *aşabiah* yang kemudian diterjemahkan sebagai solidaritas sosial (*social solidarity*) yang disatukan karena kesamaan visi dan misi antara anggotanya dapat menjadi partai oposisi dan merupakan kebutuhan yang dikukuhkan dengan ajaran agama.

---

<sup>10</sup> Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)

## E. KERANGKA TEORITIK

Berbicara mengenai oposisi maka tidak bisa terlepas dari demokrasi, karena oposisi dinilai sebagai mekanisme yang *inhern* (melekat) dalam sistem demokrasi. Keterikatan antara oposisi dan demokrasi sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip yang mendasarinya, yakni penghargaan yang tinggi atas perbedaan. Dalam demokrasi perbedaan bukan barang baru yang harus dimusuhi atau dijauhi. Melainkan merupakan unsur yang tak terpisahkan dari bangunan demokrasi, tanpa adanya prinsip penghargaan pada perbedaan, oposisi akan kehilangan makna yang mendasarinya.

Demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya *rule of law*. Hal ini disebabkan dalam sistem demokrasi, yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak-hak dasar seperti hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul dan berserikat, harus memerlukan adanya aturan main yang jelas dan dipatuhi bersama yang merupakan dasar dari kehidupan berbudaya dan berperadaban yang merupakan wujud masyarakat madani.<sup>11</sup>

Dalam terminologi politik, kelompok oposisi mempunyai hak-hak kebebasan antara lain kebebasan berfikir dan berpendapat, mengadakan pertemuan-pertemuan, membentuk organisasi dan media massa. Hak-hak tersebut dalam sistem negara yang demokratis mendapat jaminan sebagai pilar politik.<sup>12</sup>

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan jaminan kepada umat atau individu untuk mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam

---

<sup>11</sup> M. AS. Hikam, *Wacana Politik*, hlm. 3.

<sup>12</sup> Jabir Qumaihah, *Beroposisi*, hlm. 49.



semua pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Umat mendapat hak ini dari sifat hubungannya dengan kepala negara yang merupakan hubungan perwakilan, karena umatlah yang memilikinya.<sup>13</sup>

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara yang dijamin oleh Islam, hanya dapat dibenarkan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian kebebasan berbicara sebagai perwujudan dari bentuk pengabsahan Islam tentang oposisi tidak boleh disalahgunakan sebagai kebebasan untuk berbuat kezaliman dan kemungkaran.

Kebebasan berpendapat ini meliputi urusan-urusan kehidupan umum, perilaku-perilaku manusia dan pemerintahan politik kebijaksanaan mereka, tidak ada seorangpun maupun pemerintah untuk menghalang-halangi atau membatasi kebebasan tersebut. Kecuali jika kebebasan itu menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain serta pencorengan terhadap kemuliaan dan kehormatan mereka dan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu.

Kebebasan-kebebasan tersebut yang merupakan bagian dari hak universalitas (baca: HAM) harus digunakan dan diorientasikan untuk menunjang prinsip penegakan kepastian hukum dan keadilan, menolong yang lemah dan sebagai manifestasi dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar*.

Allah swt. berfirman:

---

<sup>13</sup> Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa Abdul Aziz (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), hlm. 40.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر  
وتؤمنون بالله<sup>14</sup>

Dalam kehidupan politik, oposisi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah mekanisme politik yang demokratis dan terkontrol yaitu terkontrolnya manajemen kekuasaan oleh kekuatan rakyat, yang secara teoritik berada di luar pagar kekuasaan. Tanpa adanya oposisi, sebuah pemerintahan seringkali menjadi otoriter, menindas dan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga sikap oposisi ini harus tetap dilakukan dalam kerangka untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan, karena tujuan utama dari oposisi adalah menciptakan suatu masyarakat yang adil.

Dengan demikian, oposisi merupakan upaya membawa model partisipasi dalam proses politik dan mendorong agar semua elemen yang bekerja hanya menghasilkan satu *out put* saja yakni keadilan.<sup>15</sup>

Rasulullah saw. bersabda :

من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه  
وذلك أضعف الإيمان<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ali Imran (3) : 110

<sup>15</sup> Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi*, hlm. xii.

<sup>16</sup> An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah), VIII:112. "Kitāb al-Imān wa Syarā'ih", "Bab Tafādilu ahla al-Imān". Hadis ini di riwayatkan dari Muhammad bin Basysyār diceritakan dari 'Abd ar-Rahmān diceritakan dari Sufyān dari Qais bin Muslim dari Tāriq bin Syihāb dari Abu Sāid. Kualitas hadis ini sahih.

Dari hadits di atas dapat dimengerti bahwa setiap muslim harus menolak setiap kemunkaran atau kesalahan yang ada di hadapannya baik dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau bahkan oleh pemerintah.

Untuk menjamin berlangsungnya proses demokratisasi sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip tersebut, maka diperlukan suatu lembaga oposisi yang secara *legitimate* diakui oleh pemerintah yang merupakan wadah dari bentuk penyaluran aspirasi rakyat dan untuk melindungi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan hak-hak lainnya, yang bertugas mengontrol kekuasaan secara kontinyu dan konsisten.

Lembaga-lembaga yang sekarang banyak bermunculan merupakan suatu bentuk dari pengimplementasian dari kebebasan berkumpul, berserikat dan berkelompok baik berdasarkan etnis, agama, kecenderungan politik dan lain-lain. Islam sebagai suatu ajaran komprehensif memberikan nilai-nilai universal untuk melaksanakan kebebasan ini yang sudah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan. Kebebasan ini akan melahirkan demokrasi yang amat urgen dalam kehidupan politik.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih* (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 17.

## F. METODE PENELITIAN

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tema politik.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu merumuskan data-data yang terkumpul dalam bentuk karya tulis ilmiah secara sistematis yang berhubungan dengan tema oposisi khususnya di Indonesia dan kemudian menganalisisnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosio-Historis, yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisa dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Sedangkan historis yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif dari kajian atau peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensitesiskan data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat. Dalam hal ini di bahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada pemerintahan Indonesia mengenai oposisi.

#### 4. Analisis Data

Data-data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dianalisis kerangka umum mengenai oposisi, kemudian akan mendeduksikannya dengan menggunakan analisis fungsional struktural yaitu analisis yang pada prinsipnya berkisar pada konsep fungsi dan konsep struktur.<sup>18</sup>

#### 5. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan tema oposisi yang meliputi sumber data primer seperti buku yang di tulis oleh Jabir Qumaiahah yang berjudul *Beroposisi Menurut Islam*, buku yang berjudul *Membangun Oposisi: membangun agenda-agenda perubahan politik masa depan* yang ditulis oleh Eep Saefullah Fatah, dan lain sebagainya maupun data-data sekunder yang bertujuan untuk mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu: bab pertama berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup> S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 68.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum mengenai oposisi dan sistem pemerintahan yang meliputi antara lain, pengertian oposisi yang dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu oposisi parlementer dan oposisi ekstra parlementer, kemudian Lebih jauh digambarkan tentang pola umum oposisi, dan juga peranan oposisi, dan selanjutnya akan diuraikan tentang sistem pemerintahan.

Bab ketiga menggambarkan tentang oposisi dalam pemerintahan Indonesia, yang meliputi antara lain tentang sistem pemerintahan Indonesia, yang dibagi menjadi tiga sub bab yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Selanjutnya diuraikan tentang oposisi di Indonesia, yang mencakup sejarah oposisi, hubungan lembaga-lembaga politik, dan proses demokratisasi di Indonesia.

Bab keempat yang merupakan bab analisis menguraikan tentang oposisi menurut Perspektif fiqh siyasah yang meliputi tentang prinsip ketaatan kepada pemimpin, ketaatan terhadap konstitusi, budaya oposisi dalam Islam, batas-batas melakukan oposisi dan terakhir dipaparkan tentang tujuan oposisi dalam Islam.

Bab kelima yang merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Oposisi pada masa demokrasi parlementer lebih cenderung bersifat royal yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dari periode itu memberikan kesan kuat bahwa partai oposisi tidak berfungsi dengan baik karena hanya menumbuhkan kultur oposisi yang melawan pemerintah.

Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin usaha-usaha untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial mengalami masa-masa suram. Rezim pemerintahan demokrasi terpimpin merupakan rezim pemerintahan patrimonial yang menolak dalam bentuk apapun pengawasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam demokrasi pancasila tidak mengenal adanya oposisi yang menjurus kepada peruncingan masalah-masalah dan perbedaan pendapat yang bertentangan sehingga melahirkan sikap apriori, namun demikian diperkenankan adanya sikap menghargai perbedaan pendapat, kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh UUD.

Ide oposisi lebih dimaksudkan sebagai kegiatan kenegaraan yang dimaksudkan untuk mendapatkan arah kegiatan kenegaraan yang lebih baik dengan cara melakukan dialog.

Dengan demikian oposisi dalam pemerintahan Indonesia lebih diposisikan sebagai mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) sebagai peran kontrol dan respon terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan prasyarat dan kunci untuk membangun sistem politik yang baik dan dinamis.

2. Mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) ini menurut Islam hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Sikap oposisi ini harus dilakukan secara proporsional dan konstusional (*al-Mauizah al-Hasanah*). Hal ini supaya transformasi politik tetap berada dalam kondisi yang stabil dan tidak membawa kerusakan pada sendi-sendi kemasyarakatan.

Berangkat dari hal di atas maka apabila pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, maka rakyat wajib mentaatinya baik senang maupun tidak, selama tidak untuk melakukan maksiat.

## **B. SARAN-SARAN**

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis perlu menyampaikan beberapa saran-saran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut:



1. Dalam penelitian ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan perlunya diadakan penelitian lebih lanjut secara komprehensif dan mendalam.
2. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang lain yang tertarik dengan tema oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

### B. HADIS

'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu wa al-Marjān*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

An-Naṣā'ī, *Sunan an-Naṣā'ī*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, VIII:112

Al-Munzir, *al-Targhib wa al-Tarhīb min al-Ḥadis al-Syarīf*, 6 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Hibban, Ibnu, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibban*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Tirmidzi, *Jami' as-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

### C. FIQH DAN USUL FIQH

Abdurrahman, M., *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*, Bandung: Rosdakarya, 2002.

Abdurrahman, Moeslim, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Hakikat Sistem Politik Islam: Suatu Telaah Tentang Tata Hukum, Keadilan, Ketaatan, dan Syura*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.

Ahmad, Khurshid, *Pesan Islam*, alih bahasa Achsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1983

Asy-Syal, Abdul Hadi, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Dian, 1987.

Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Politik Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Nasr, Sayyed Hossein, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, alih bahasa Nurasiah Fakhri Sutan Harahap, Bandung: Mizan, 2003.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Qumaihah, Jabir, *Berposisi Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.
- Qutb, Sayyid, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Suyūṭy, Jalaluddin As-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1999 M.
- Tebba, Sudirman, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Abdul Aziz, Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.

#### D. LAIN-LAIN

- Abdulgani, Roeslan, *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Ali, Moh. Daud dan Habibah Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Anam, A. Khoirul, "Potensi NU Menjadi Oposisi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/18/opini/1030021.htm>

- Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, cet. ke-4, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Arfani, Riza Noer, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bawazier, Fuad, "Dilema Hilangnya Oposisi", *Republika*, Rabu, 17 Oktober 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Culla, Ardi Suryadi, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dzulfikriddin, M., "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", *al-Fatah*
- Esposito, John L., dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Fatah, Eep Saefullah, *Membangun Oposisi: Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Bandung: Rosadakarya, 1999.
- Gazali, Zulfikar, dkk., *Sejarah Politik Indonesia*, Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1989.
- Hikam, M. AS. (dkk.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- "Indikator Sistem Politik Demokratis", <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=9&mnorutisi=5>
- Juliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Kalilauw, Syam, "Menguatkan Empat Pilar Demokrasi" <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/4/30/p5.htm>
- Khazim, Musa, (Ed), *Menuju Indonesia Baru: Menggagas Reformasi Total*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara*, Magelang: Indonesiatara, 2004.

- Kusnadi, "Konsep Jihad Menurut al-Hadits", *Al-Fatah*, No. 20/Vol. XXII/Juni 2002.
- Lewis, Bernard, et. al., *Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Madjid, Nurkholish, "Pendidikan untuk Demokrasi", *Jurnal Universitas Paramadina* Vol. 1 No. 3 Mei 2002.
- Mahfud MD., Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Maksun, "Islam dan Gagasan Oposisi Loyal", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/14/opi3.htm>
- "Mengatur Wakil Rakyat dengan Syari'at", [http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=336\\_0\\_1\\_0\\_C4](http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=336_0_1_0_C4)
- Mulkhan, Abdul Munir, *Teologi kebudayaan dan Demokrasi Modernitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Nusantara, Abdul Hakim G., *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Pandoyo, Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Partono, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Rais, Amien, *Suksesi & Keajaiban Kekuasaan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sabon, Max Boli, dkk., *Ilmu Negara*, cet ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sarjadi, Soegeng, *Drama Politik Tanpa Skrip*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Setowara, Subhan, "Oposisi dan Kritik Kekuasaan" [http://www.denpasar.go.id/new/main.php?act=i\\_opi&xid=26](http://www.denpasar.go.id/new/main.php?act=i_opi&xid=26)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Sugiarto, Toto, "Oposisi Loyal di DPR dan Kemajuan Demokrasi" *Kompas*, 4 Oktober 2004.
- Sulastomo, "Kabinet Presidensial ala Indonesia", *Kompas*, Rabu 4 Juni 2003.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Taranggono, Eko, "Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu" *Jurnal al-Afkar* Edisi VI, Tahun ke-5 : Juli – Desember 2002.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam: Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Uhlin, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Warsito, Tulus, *Pembangunan Politik: Refleksi Kritis Atas Krisis*, Yogyakarta: BIGRAF, 1999.
- Widodo, *Gejala Kearifan Kultur Oposisi Dalam Demokrasi Pancasila*, Yogyakarta: Komando Wilayah Pertahanan II Penerangan, 1977.
- Wirosardjono, Soetjipto, *Dialog dengan Kekuasaan: Esai-Esai Tentang Agama, Negara dan Rakyat*, Bandung: Mizan, 1995.

## Lampiran I

### Terjemahan –Terjemahan

NO	HLM	FN	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	11	14	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
2	11	16	Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka harus merubah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman
			<b>BAB IV</b>
3	56	3	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
4	57	5	Mendengar dan mematuhi pemimpin adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, kecuali jika ia diminta untuk berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk berbuat maksiat maka tidak wajib mendengar dan mematuhi.
5	61	18	Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang benar dihadapan penguasa yang dzalim.
6	64	27	Apabila banyak orang menyaksikan kezaliman dan mereka tidak mencegah dengan kekuatan yang ada pada mereka maka dapat dipastikan Allah akan meratakan hukuman-Nya terhadap semua orang.

7	64	30	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	65	32	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
9	67	38	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (memeluk Islam) menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
10	71	46	Katakanlah yang <i>haq</i> (benar) walau pahit sekalipun.
11	71	47	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### SAYYID QUTB

Beliau hidup di Mesir pada suatu periode ketika perbedaan pemikiran dan debat di bawah kerajaan, tunduk kepada monolog Nasserisme. Ia lahir pada tahun 1906 M, dari keluarga menengah di Mesir. Qutb pindah ke Kairo pada tahun 1920-an untuk menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya ia menjadi guru dan inspektur pada kementerian pendidikan, menjadi pegawai di sana sampai ia mengundurkan diri pada tahun 1953. pada saat yang sama, ia terkenal sebagai penulis dan kritikus sastra, di bawah bimbingan dan pengaruh tokoh seperti 'Abbas al-Aqqad. Sejak ia kembali dari Amerika pada tahun 1950, di Mesir sedang terjadi krisis politik, yang kemudian menyebabkan terjadinya kudeta militer pada bulan Juli 1952. selama periode inilah, tulisan Qutb lebih diwarnai kritik sosial dan polemik politik. Ia aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, yang kemudian membawanya ke penjara pada tahun 1966, tepatnya tanggal 29 Agustus, ia dieksekusi dengan hukuman gantung.

#### YUSUF QARDHAWY

Dr. Yusuf Qardhawiy dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir yang bernama Saft Turab di tengah delta pada tanggal 9 September 1926. pada usia dua tahun Qardhawiy kecil menjadi anak yatim dan diasuh oleh pamannya. Pada usia yang kurang dari sepuluh tahun ia telah menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Pada usia yang relatif muda ia menjadi imam shalat khususnya pada salat subuh, di daerah Kuttab. Setelah itu ia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu (*Ma'had tanta dan ma'had sanawy*) dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak ia kecil, hingga seorang gurunya menggelarnya dengan *allamah* (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Setelah itu ia meneruskan kuliah di Fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar, selesai pada tahun 1952 sebagai peringkat pertama. antara tahun 1953 – 1960 Qardhawiy melanjutkan kuliahnya di Universitas ternama ini, dan pada tahun 1957 kembali berprestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama dari lima ratus orang mahasiswa di Fakultas Bahasa Arab. Saat Mesir dipegang raja Faruk pada tahun 1949 pada usia yang sangat muda Qardhawiy masuk bui akibat keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna.

## Lampiran III

### CURRICULUM VITAE

Nama : MASHADI  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Agustus 1981  
Alamat : Desa Barisan Kec. Losari Kab. Cirebon  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
NIM : 99373566

#### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri IV Losari – Cirebon lulus tahun 1993
3. SMP Islam Losari – Brebes lulus tahun 1996
4. MA Sunan Pandanaran Sleman - Yogyakarta lulus tahun 1999
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999

#### Nama Orang Tua:

Ayah : H. Abdul Mu'min  
Ibu : Hj. Siyanah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Losari – Cirebon